

altenpflege.de Edition

Buku Ajar Singkat untuk Pendidikan Keperawatan - Fokus pada Perawatan Lansia

Theo Ahrens

Hak Tanggung Jawab dan Kewajiban Profesional

presented by

YES
ARCH
ITEC
TURE.

Informasi Bibliografi

Theo Ahrens – Biografi Singkat

Theo Ahrens, lahir 1979 di dekat München, adalah seorang guru untuk profesi keperawatan dan pendidik keperawatan yang berdedikasi. Setelah menjalani Tahun Sosial Sukarela di rumah sakit, ia menyelesaikan pelatihan sebagai perawat kesehatan dan mengumpulkan pengalaman berharga di bangsal intensif. Didorong oleh keinginannya untuk berbagi pengetahuan, ia belajar pendidikan keperawatan dan mulai mengajar di sekolah kejuruan di München pada tahun 2009. Theo dikenal karena pengajarannya yang praktis dan empatik, yang mempersiapkan calon perawat untuk profesi mereka yang menuntut. Secara pribadi, ia tinggal bersama istri dan dua anaknya di Berlin dan melakukan pekerjaan sukarela untuk meningkatkan kondisi dalam pendidikan keperawatan.

Panduan ini diformulasikan dari materi yang ada dengan memanfaatkan K.I. Penerjemahannya dilakukan secara otomatis.

Diterbitkan oleh altenpflege.de

Harga gratis.

Hak Cipta 2024 altenpflege.de

Saran dan perbaikan silakan kirim ke team@altenpflege.de

1/1-2412181526

Daftar Isi

1 Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Buku Panduan Singkat Ini	4
1.2 Makna Tanggung Jawab dan Kewajiban Profesi dalam Perawatan Lansia	4
1.3 Peran Tenaga Perawat dalam Hukum Pertanggungjawaban dan Tanggung Jawab Mereka	5
2 Dasar-dasar Hukum Tanggung Jawab dalam Perawatan Lansia	7
2.1 Definisi dan Pentingnya Tanggung Jawab dalam Profesi Keperawatan	7
2.2 Perbedaan antara tanggung jawab perdata, pidana, dan ketenagakerjaan	7
2.3 Hubungan antara Tanggung Jawab Hukum, Tanggung Jawab, dan Pelanggaran Kewajiban	8
2.4 Landasan hukum yang relevan (BGB, SGB, KUHP)	9
3 Jenis-jenis Tanggung Jawab	11
3.1 Tanggung Jawab Perdata	11
3.2 Tanggung Jawab Pidana	12
3.3 Tanggung Jawab Hukum Ketenagakerjaan	12
3.4 Tanggung Jawab Kontraktual	13
4 Persyaratan Tanggung Jawab	15
4.1 Bentuk Pelanggaran Kewajiban	15
4.2 Penyebab dan Kausalitas	16
4.3 Kesalahan	16
4.4 Kerugian	17
5 Kewajiban Profesional Perawat	19
5.1 Makna Kewajiban Profesional dalam Perawatan Lansia	19
5.2 Kewajiban Etis Profesi	19
5.3 Kewajiban Hukum	20
5.4 Kewajiban Dokumentasi dan Pelaporan	21
5.5 Kewajiban Kerahasiaan dan Kerahasiaan Profesi	22
6 Kewajiban Perawat terhadap Penghuni, Keluarga, dan Rekan Kerja	23
6.1 Kewajiban terhadap Penghuni	23
6.2 Kewajiban terhadap Keluarga	23
6.3 Kewajiban terhadap Rekan Kerja	24
6.4 Kewajiban terhadap Atasan dan Pemberi Kerja	25
7 Pelanggaran Tugas yang Umum dan Akibatnya	26
7.1 Pelanggaran Kewajiban Pengawasan	26
7.2 Pelanggaran terhadap Kewajiban Dokumentasi	27
7.3 Pelanggaran Kewajiban Kerahasiaan	27
7.4 Pelanggaran Kewajiban Perawatan	28
7.5 Pelanggaran Peraturan Kebersihan	29
8 Menghindari Kasus Tanggung Jawab	31
8.1 Pencegahan melalui Dokumentasi Perawatan yang Benar (aturan 6-R)	31
8.2 Mematuhi Peraturan Kebersihan	32
8.3 Pencegahan Jatuh dengan Tindakan Pencegahan	32
8.4 Kepatuhan terhadap Peraturan Pemberian Obat	33
8.5 Pelatihan dan Pendidikan tentang Dasar Hukum dan Tugas Profesional	34
9 Tanggung Jawab atas Kesalahan dalam Perawatan	36
9.1 Apa Saja Kesalahan dalam Perawatan?	36
9.2 Tanggung Jawab atas Kesalahan Perawatan (perdata, pidana, ketenagakerjaan)	36
9.3 Beban pembuktian dalam kesalahan perawatan	37
9.4 Dampak dari Kesalahan Perawatan	38
10 Pentingnya Dokumentasi Perawatan dalam Hukum Tanggung Jawab	40
10.1 Pentingnya Dokumentasi Perawatan	40
10.2 Prinsip-prinsip Dokumentasi (lengkap, tepat waktu, objektif)	40
10.3 Bentuk Dokumentasi	41
10.4 Kesalahan Umum dalam Dokumentasi dan cara menghindarinya	42
10.5 Konsekuensi Hukum akibat Dokumentasi yang Salah atau Tidak Lengkap	43
11 Menangani Kasus Tanggung Jawab di Praktik	44
11.1 Tindakan dalam Kasus Dugaan Tanggung Jawab	44
11.2 Kerja Sama dengan Atasan dan Pemberi Kerja	44
11.3 Komunikasi dengan Penghuni dan Keluarga	45
11.4 Peninjauan internal dan eksternal terhadap kasus tanggung jawab	46
12 Perlindungan Hukum dan Asuransi untuk Tenaga Perawat	48
12.1 Asuransi Tanggung Jawab Profesional	48
12.2 Perbedaan antara asuransi tanggung gugat pribadi dan profesional	49
12.3 Biaya Ditanggung oleh Pemberi Kerja	50
12.4 Klaim Asuransi dalam Tanggung Jawab Perdata	51

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Buku Panduan Singkat Ini

Buku ajar singkat ini bertujuan memberikan Anda gambaran jelas tentang topik kompleks hukum tanggung jawab dan kewajiban profesional dalam perawatan lansia. Fokusnya adalah untuk memberikan Anda pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan sehari-hari terkait tanggung jawab hukum dan etis.

Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara jelas berbagai jenis tanggung jawab dan persyaratan hukum yang menyertainya. Anda akan belajar bagaimana mengenali kasus tanggung jawab dalam kehidupan kerja sehari-hari, menghindarinya secara preventif, dan bertindak dengan benar jika diperlukan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya dokumentasi perawatan akan ditingkatkan dan penanganannya yang benar akan dipastikan.

Aspek penting adalah pemahaman tentang pelanggaran kewajiban, kemungkinan konsekuensinya, dan pengembangan strategi untuk menghindarinya. Anda juga diharapkan memahami dan menginternalisasi kewajiban profesional sebagai bagian integral dari pekerjaan sehari-hari Anda. Isi dari buku ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum serta rekomendasi tindakan praktis, sehingga dapat mendukung perkembangan profesional Anda secara optimal.

1.2 Makna Tanggung Jawab dan Kewajiban Profesi dalam Perawatan Lansia

Dalam perawatan lanjut usia, tanggung jawab memegang peran penting karena layanan perawatan dan tenaga perawat memiliki tanggung jawab besar terhadap penghuni, keluarga, dan masyarakat. Tanggung jawab ini muncul dari kewajiban untuk menjamin perawatan yang berkualitas tinggi, aman, dan penuh penghormatan. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, konsekuensi hukum dapat terjadi.

Masalah tanggung jawab terutama berkaitan dengan bidang hukum perdata, pidana, dan ketenagakerjaan. Konsekuensi penting dapat berupa tuntutan ganti rugi perdata yang terjadi akibat pelanggaran kewajiban karena kelalaian atau kesengajaan. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan kesalahan pribadi tenaga perawat, terutama dalam pelanggaran berat yang mengancam jiwa atau kesehatan penghuni. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pelanggaran kewajiban dapat mengakibatkan tindakan disipliner dari pihak pemberi kerja, hingga pemutusan hubungan kerja.

Kewajiban profesional dalam perawatan lanjut usia mencakup ketentuan hukum dan etika yang membimbing tindakan tenaga perawat. Kewajiban ini memastikan bahwa penghuni selalu diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Ini termasuk kewajiban untuk dokumentasi perawatan yang teliti, yang berguna untuk penjaminan kualitas serta pembuktian dalam kasus tanggung jawab. Kewajiban lainnya termasuk kerahasiaan, peraturan kebersihan, serta kewajiban untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan.

Perilaku salah atau mengabaikan kewajiban profesional ini tidak hanya dapat memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan penghuni dan keluarga mereka secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan arti tanggung jawab dan kewajiban profesional guna menjamin perawatan lanjut usia yang aman dan etis. Dasar-dasar ini membentuk fondasi untuk praktik profesional yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menempatkan kesejahteraan penghuni sebagai prioritas utama.

1.3 Peran Tenaga Perawat dalam Hukum Pertanggungjawaban dan Tanggung Jawab Mereka

Tenaga perawat memainkan peran kunci dalam hukum tanggung jawab karena mereka berinteraksi langsung dengan penghuni dan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Tanggung jawab mereka mencakup memastikan bahwa semua tindakan perawatan dilakukan secara profesional dan hati-hati. Tanggung jawab ini berasal dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum dan etika.

Kepatuhan terhadap kewajiban kehati-hatian sangat penting. Tenaga perawat harus selalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan penghuni. Ini berarti mereka harus mengenali risiko perawatan dan mencegahnya. Dalam hal ini, tidak hanya pelaksanaan perawatan yang penting, tetapi juga dokumentasi dan komunikasi yang benar tentang apa yang terjadi dalam praktik perawatan.

Tanggung jawab dalam hukum tanggung jawab juga berarti tenaga perawat harus terus-menerus meningkatkan kompetensi profesional mereka. Partisipasi dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan sangat penting untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang praktik perawatan dan persyaratan hukum. Pengetahuan penting mencakup peraturan kebersihan terkini dan langkah darurat serta penanganan yang tepat dengan peralatan medis dan obat-obatan.

Penerimaan tanggung jawab mereka juga mewajibkan tenaga perawat untuk bekerja sama secara aktif dalam tim. Ini mencakup komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, penghuni, dan keluarga mereka. Dokumentasi perawatan yang cermat di sini tidak hanya sebagai alat bukti dalam kasus tanggung jawab, tetapi juga untuk kerja sama yang efektif dan jaminan kualitas layanan perawatan.

Untuk menghindari dampak dari pelanggaran tanggung jawab ini, tenaga perawat harus menyadari peran sentral mereka dan aktif melaksanakannya. Dengan memahami tanggung jawab mereka dalam hukum tanggung jawab, mereka dapat meminimalkan risiko kasus tanggung jawab dan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas perawatan. Tanggung jawab aktif ini tidak hanya melindungi penghuni, tetapi juga tenaga perawat itu sendiri dari konsekuensi hukum dan berkontribusi pada pemeliharaan reputasi profesional.

preview

2 Dasar-dasar Hukum Tanggung Jawab dalam Perawatan Lansia

2.1 Definisi dan Pentingnya Tanggung Jawab dalam Profesi Keperawatan

Haftung dalam Profesi Perawat

Haftung dalam profesi perawat berarti kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian sendiri. Dalam perawatan lanjut usia, haftung memainkan peran sentral karena perawat, melalui kontak dekat dengan orang yang membutuhkan perawatan, memiliki tanggung jawab khusus.

Tanggung jawab haftung ini mencakup berbagai bidang: tanggung jawab perdata, pidana, dan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, ini dapat berupa tuntutan ganti rugi akibat kesalahan perawatan, kemungkinan konsekuensi pidana akibat pelanggaran berat, atau tindakan disipliner oleh pemberi kerja.

Perawat harus menyadari kewajiban mereka untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan penerima perawatan. Ini memerlukan cara kerja yang cermat, pendidikan lanjutan yang teratur, serta pemenuhan standar dan prosedur. Hanya dengan cara ini risiko kasus haftung dapat diminimalkan.

Pentingnya haftung dalam profesi perawat muncul dari kerentanan orang yang membutuhkan perawatan. Setiap kesalahan dapat memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu, kesadaran akan kerangka hukum adalah komponen penting dari praktik perawatan profesional.

2.2 Perbedaan antara tanggung jawab perdata, pidana, dan ketenagakerjaan

Tanggung jawab dalam perawatan lansia menyentuh berbagai bidang hukum: perdata, pidana, dan ketenagakerjaan. Setiap bidang ini memiliki prasyarat dan konsekuensinya sendiri.

Tanggung Jawab Perdata mengharuskan pembayaran ganti rugi jika akibat dari tindakan lalai atau sengaja mengakibatkan kerugian. Tenaga perawat dapat dimintai pertanggungjawaban jika melanggar kewajiban kehati-hatian dan menyebabkan penghuni mengalami kerugian. Contoh: Seorang penghuni terjatuh karena seorang perawat lupa menutup pagar tempat tidur.

Tanggung Jawab Pidana terjadi ketika ada pelanggaran hukum yang diadili secara pidana. Ini berkaitan dengan tindakan bersalah yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemungkinan akibatnya adalah denda atau hukuman penjara. Contohnya adalah penganiayaan, seperti ketika seorang penghuni terluka akibat kelalaian berat karena obat diberikan secara salah.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan menyangkut hubungan antara tenaga perawat dan pemberi kerja. Di sini, pelanggaran kewajiban dapat mengakibatkan tindakan disipliner seperti peringatan atau pemecatan. Kasus semacam ini dapat terjadi jika seorang perawat terus-menerus mengabaikan instruksi kerja dan mengganggu atau membahayakan proses operasional. Pemahaman tentang perbedaan ini membantu tenaga perawat menilai tanggung jawab mereka dengan benar dan menghindari konsekuensi hukum. Pelatihan rutin dan penerapan metode kerja yang sesuai dengan hukum sangat penting untuk meminimalkan risiko.

2.3 Hubungan antara Tanggung Jawab Hukum, Tanggung Jawab, dan Pelanggaran Kewajiban

Das Verhältnis von Haftung, Verantwortung und Pflichtverletzung in der Altenpflege

Das Verhältnis von Haftung, Verantwortung und Pflichtverletzung in der Altenpflege bildet ein sensibles Gefüge, das den Alltag von Pflegekräften entscheidend beeinflusst. Haftung entsteht, wenn Pflegekräfte gegen ihre beruflichen Pflichten verstoßen und dadurch Schäden verursachen. Solche Pflichtverletzungen können aus Unachtsamkeit, Unkenntnis oder dem Ignorieren von Pflegestandards resultieren. Verantwortung ist die Verpflichtung, entsprechend der beruflichen Rolle und ethischen Grundsätze zu handeln.

Die Verantwortung geht über das bloße Einhalten gesetzlicher Vorgaben hinaus und umfasst auch moralische und ethische Überlegungen, die das Wohlergehen der Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt stellen. Eine Pflichtverletzung liegt vor, wenn Pflegekräfte ihre berufsspezifischen Aufgaben nicht ordnungsgemäß ausführen, was einen Verstoß gegen gesetzlich oder vertraglich vereinbarte Standards darstellt.

Pflegekräfte müssen sich der möglichen rechtlichen Konsequenzen bewusst sein, die ein Fehlverhalten nach sich ziehen kann. Ein Beispiel ist die unzureichende Schmerzbehandlung eines Bewohners, die durch unzureichende Kenntnis der Medikation entstehen kann. Diese Pflichtverletzung kann sowohl zivilrechtliche als auch straf- und arbeitsrechtliche Folgen haben, je nach Schweregrad und Auswirkung auf den Bewohner.

Ein klar abgegrenztes Verhältnis von Haftung und Verantwortung hilft, ein besseres Verständnis für die Rechte und Pflichten im Pflegealltag zu entwickeln. Präventive Maßnahmen, wie Schulungen und das Einführen von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sind essenziell, um Pflegefehler zu vermeiden. Die rechtzeitige Dokumentation und eine offene Kommunikation im Team unterstützen zusätzlich, das Risiko von Haftungsfällen zu verringern.

So gelingt es, die Sicherheit und das Wohl der pflegebedürftigen Menschen effektiv zu schützen und zugleich das Risiko für Pflegekräfte zu minimieren, in Haftung genommen zu werden. Dies stellt sicher, dass Pflegekräfte ihrer wichtigen Aufgabe mit dem notwendigen rechtlichen Hintergrundwissen und der nötigen Sorgfalt nachkommen können.

2.4 Landasan hukum yang relevan (BGB, SGB, KUHP)

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Sozialgesetzbuch (SGB) und das Strafgesetzbuch (StGB) bilden die rechtlichen Grundlagen für die Haftung und Berufspflichten in der Altenpflege.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Das BGB regelt zivilrechtliche Ansprüche. In der Altenpflege betrifft dies insbesondere Schadenersatzansprüche. Diese entstehen beispielsweise durch Verletzung von Sorgfaltspflichten. Eine Pflegekraft, die fahrlässig oder vorsätzlich einen Bewohner schädigt, kann nach BGB zur Haftung herangezogen werden. Besonders relevant sind hier die Bestimmungen zu unerlaubten Handlungen (§§ 823 ff. BGB), die regeln, wann jemand verpflichtet ist, Schadenersatz zu leisten.

Sozialgesetzbuch (SGB): Das SGB umfasst mehrere Bände, die verschiedene Aspekte der sozialen Sicherung thematisieren. Besonders bedeutsam für die Altenpflege ist das SGB XI, das die Pflegeversicherung regelt. Es definiert Leistungen, die Pflegestandards sowie Qualitätsanforderungen. Die Einhaltung dieser Standards ist für Pflegekräfte bindend, um sowohl die Versorgungssicherheit der Bewohner als auch den rechtlichen Schutz der Pfleger zu gewährleisten.

Strafgesetzbuch (StGB): Das StGB etabliert strafrechtliche Grundlagen für Vergehen, die nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. In der Altenpflege ist hier besonders die Körperverletzung (§§ 223 ff. StGB) relevant. Fahrlässige oder vorsätzliche Taten, wie z.B. falsche Medikamentenvergabe, können strafrechtlich verfolgt werden. Auch Straftaten wie die Verletzung der Schweigepflicht (§ 203 StGB) sind relevant, da sie das Vertrauensverhältnis zwischen Bewohnern und Pflegekräften betreffen.

Das Zusammenspiel dieser gesetzlichen Grundlagen ist entscheidend. Pflegekräfte müssen sowohl zivilrechtliche, als auch soziale und strafrechtliche Regelungen kennen und beachten. Schulungen und rechtliche Fortbildung sind essenziell, um das Risiko von Verstößen zu minimieren und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Das Wissen um diese Gesetzeslagen und ihre Anwendung in der Praxis ist ein Grundpfeiler professioneller Pflegearbeit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BGB), Kitab Undang-Undang Hukum Sosial (SGB), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (StGB) membentuk dasar hukum untuk tanggung jawab dan tugas profesional dalam perawatan lansia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BGB): BGB mengatur klaim hak perdata. Dalam perawatan lansia, ini terutama berkaitan dengan klaim ganti rugi. Klaim ini muncul, misalnya, dari pelanggaran kewajiban kehati-hatian. Seorang perawat yang secara lalai atau sengaja merugikan seorang penghuni bisa dimintai tanggung jawab menurut BGB. Yang sangat relevan di sini adalah ketentuan tentang perbuatan melawan hukum (§§ 823 ff. BGB), yang mengatur kapan seseorang diwajibkan membayar ganti rugi.

Kitab Undang-Undang Hukum Sosial (SGB): SGB terdiri dari beberapa jilid, yang membahas berbagai aspek dari jaminan sosial. Yang sangat penting untuk perawatan lansia adalah SGB XI, yang mengatur asuransi perawatan. Ini mendefinisikan manfaat, standar perawatan serta persyaratan kualitas. Kepatuhan terhadap standar ini mengikat bagi perawat, untuk menjamin baik keamanan penyediaan bagi penghuni maupun perlindungan hukum bagi perawat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (StGB): StGB menetapkan dasar-dasar hukum pidana untuk pelanggaran yang mungkin memiliki konsekuensi tidak hanya secara perdata, tetapi juga hukum pidana. Dalam perawatan lansia, yang sangat relevan di sini adalah penganiayaan badan (§§ 223 ff. StGB). Tindakan lalai atau sengaja, seperti pemberian obat yang salah, dapat dituntut secara pidana. Juga kejahatan seperti pelanggaran kerahasiaan (§ 203 StGB) relevan, karena ini menyangkut hubungan kepercayaan antara penghuni dan perawat.

Interaksi dari dasar hukum ini sangatlah penting. Perawat harus mengetahui dan mematuhi peraturan baik yang bersifat perdata, sosial, maupun pidana. Pelatihan dan pendidikan hukum berkelanjutan adalah penting untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan menjamin keselamatan penghuni. Pengetahuan tentang situasi hukum ini dan penerapannya dalam praktik adalah pilar utama dari pekerjaan perawatan profesional.

7 Ini hanya pratinjau

Buku lengkapnya tersedia di <https://www.altenpflege.de> untuk pengguna yang terdaftar. Pendaftaran dan penggunaan gratis. Siapa pun yang tidak ingin mendaftar, dapat mentransfer jumlah yang disebutkan pada halaman 2 melalui Paypal ke buchhaltung@factsoft.de dan mencantumkan baik judul buku maupun alamat email. Kemudian, PDF akan dikirimkan melalui email.

Selain akses gratis ke buku teks ringkas, registrasi di [altenpflege.de](https://www.altenpflege.de) memungkinkan Anda untuk melamar pekerjaan secara langsung. Dan juga, untuk memasang iklan pekerjaan gratis. Jadilah bagian dari komunitas [altenpflege.de](https://www.altenpflege.de).